

ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA

Dwi Wijayanto^{1*}

Sekolah Tinggi Dharmawacana Metro

*corresponding author e-mail : dwiwijayanto57@gmail.com

ABSTRAK

Dalam setiap implementasi sebuah program yang ada di sebuah Desa, tentunya seorang Kepala Desa dituntut untuk dapat menjadi sosok sentral yang bisa menggerakkan, mengarahkan, dan juga memberikan solusi – solusi untuk setiap masalah yang dihadapi selama proses implementasi program tersebut, sehingga program yang diimplementasikan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Dari analisis data diketahui bahwa dalam setiap proses implementasi program di Desa mempunyai lima peranan penting yang harus dijalankannya, antara lain ialah peranan sebagai seorang pemimpin, koordinator dan komunikator, serta sebagai seorang pengawas, sekaligus penanggungjawab dalam pelaksanaan program tersebut. tetapi dalam menjalankan peranannya tersebut, Kepala Desa tidak terlepas dari kelemahan – kelemahan yang melekat padanya, kelemahan tersebut seperti komunikasi yang dijalankan dengan kurang baik yang terlihat dari cara Kepala Desa yang terbiasa menyampaikan arahan melalui staf/orang kepercayaannya saja, dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa selama proses implementasi tersebut berjalan, yang terlihat dari minimnya jumlah kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk turun kelapangan guna meninjau secara langsung proses pelaksanaan program tersebut selama proses pelaksanaan program dilapangan.

Kata kunci: *Peran, Kepala Desa*

ABSTRACT

In every implementation of a program in a village, of course a village head is required to be a central figure who can mobilize, direct and also provide solutions to every problem encountered during the program implementation process, so that the implemented program can completed well and obtained satisfactory results. From data analysis it is known that in every program implementation process in the village there are five important roles that must be carried out, including the role of a leader, coordinator and communicator, as well as a supervisor, as well as the person responsible for implementing the program. However, in carrying out his role, the

Village Head is not free from the weaknesses inherent in him, these weaknesses include poor communication which can be seen from the way the Village Head is accustomed to conveying directions only through his staff/trustees, and also the lack of supervision carried out by the Village Head during the implementation process, which can be seen from the minimal number of visits made by the Village Head to go to the field to directly observe the program implementation process during the program implementation process in the field.

Keywords: Role, Village Head

1. Pendahuluan

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di tingkat lokal, terutama dalam konteks implementasi program pembangunan di desa. Sebagai figur sentral dalam administrasi pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab atas koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program pembangunan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, hingga program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peran kepala desa dalam implementasi program desa sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan pembangunan di tingkat lokal.

Namun, dalam realitasnya, implementasi program desa seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan sumber daya, perbedaan persepsi dan kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat, serta kurangnya kapasitas dan keterampilan manajerial dalam mengelola program pembangunan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, peran kepala desa menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang peran kepala desa dalam implementasi program desa menjadi sangat relevan dan bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan program pembangunan di tingkat desa.

Permasalahan yang sering muncul meliputi berbagai hal, seperti penentuan metode pelaksanaan pembangunan apakah melalui tender atau diserahkan langsung kepada masyarakat setempat. Selain itu, penting juga memastikan proses penyaluran dana yang akurat untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana. Penentuan pembagian tugas yang sesuai bagi aparat pelaksana kegiatan juga menjadi perhatian, begitu pula dengan sistem pengawasan dan evaluasi programnya. Selain itu, aspek keamanan selama pelaksanaan hingga penyelesaian program juga menjadi pertimbangan yang penting.

Dalam konteks ini, Kepala Desa memiliki peran sentral yang membutuhkan tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul agar program dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan bagi

masyarakat. Namun, yang menarik bagi peneliti adalah bukan sekadar solusi yang dapat diberikan oleh Kepala Desa kepada pelaksana program, melainkan lebih kepada peran Kepala Desa dalam proses pelaksanaan program tersebut. Peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana Kepala Desa terlibat dalam menyusun solusi-solusi, langkah apa yang diambil dalam pencarian dan penerapan solusi tersebut, serta bagaimana Kepala Desa memposisikan dirinya dalam setiap tahapan pelaksanaan program Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan dari peran yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaksanaan program berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran kepala desa dalam implementasi program pembangunan di desa. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi peran kepala desa, baik dari segi internal maupun eksternal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pelaksanaan program desa serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di tingkat lokal.

2. KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Administrasi Negara

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad+ministrare*, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda *administratio* dan kata sifat *administrativus*. Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

- a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;
- b. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan;
- c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;
- d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafie, Tanjung, Modeong, 1999:17).

Chandler dan Plan (1987) Administrasi negara adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Bachsan (1989: 145) Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. Wayong (1969 : 111), Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Pfiffer dan Robert (1992 : 98), Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan

pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pendekatan Administrasi Negara

Perkembangan evolusioner administrasi Negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi Negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi Negara.

Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi Negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.

Pengaruh politik terhadap administrasi Negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua Negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.

3. Hubungan Administrasi Negara Dengan Tema Penelitian

Wayong (1969 : 111), Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Sedangkan tema penelitian berkaitan dengan peranan Kepala Desa, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari aparatur pemerintahan dari suatu Negara di tingkat Desa yang melakukan keseluruhan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan Negara di tingkat bawah.

4. Pengertian Kepala Desa dan Peranannya

Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut sebagai nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali). (Wikipedia, 2011).

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk Desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan Kepala Desa haruslah berpendidikan paling rendah SLTP, penduduk Desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dimana dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. (Wikipedia, 2011).

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkahlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock, Pareek mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan; dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
- d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

5. Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, pemerintah Desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

a) Teori George C. Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya

tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di Negara-Negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di Negara-Negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif merupakan upaya mengungkapkan peristiwa atau keadaan subyek/obyek penelitian serta memecahkan permasalahan yang dihadapi di saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini lebih difokuskan pada analisis masalah mengenai peran Kepala Desa dalam implementasi program Desa. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan mengumpulkan data dari obyek penelitian, dan wawancara dengan sumber informasi atau informan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, baik berupa laporan, atau dokumen serta sumber-sumber pustaka yang menunjang penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Peran Kepemimpinan

Dari awal pelaksanaan program, hingga berakhirnya program tersebut, peneliti mendapati Kepala Desa seringkali berperan sebagai pemimpin. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kali diadakannya rapat dengan pihak – pihak pelaksana dan pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan program tersebut yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa, sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

1) Koordinator

Selain berperan sebagai pimpinan, Kepala Desa juga memiliki peran sebagai seorang koordinator yang cukup baik, selama proses implementasi/pelaksanaan program tersebut. Hal ini juga terlihat dari rapat koordinasi pembagian tugas yang dilakukan sebelum pelaksanaan program dilapangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa, sehingga ketika program tersebut sampai pada proses dilapangan semuanya dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya pun sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2) Komunikator

Dari analisis yang peneliti lakukan selama proses penelitian, peneliti dapat menemukan bahwa Kepala Desa juga mempunyai peranan sebagai komunikator dalam pelaksanaan program tersebut

3) Monitoring / Pengawas

Selama proses pelaksanaan program dilapangan hingga selesai, Kepala Desa tercatat beberapa kali turun kelapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan program tersebut, hal ini memberikan gambaran bahwa selama proses pelaksanaan program tersebut Kepala Desa juga berperan sebagai seorang pengawas.

4) Penanggung Jawab

Kepala Desa mempunyai peranan sebagai seorang pimpinan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, maka secara otomatis tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut pun berada di pundaknya, dan ini berarti seorang Kepala Desa tersebut juga mempunyai peranan sebagai seorang penanggungjawab. Jadi dalam hal pelaksanaan program Desa di Desa Labuhan Ratu ini, dapat ditemukan pula bahwa Kepala Desa Labuhan Ratu mempunyai peranan sebagai seorang penanggungjawab terhadap program ini. Hal ini pun dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa pada akhir pelaksanaan program tersebut.

b) Analisis Data/Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program.

1) Implementasi Program Pengaspalan Jalan

Proses ini meliputi rapat koordinasi, maka dapat diketahui bahwa pada setiap awal proses pelaksanaan suatu program, selalu dilakukan sebuah pertemuan/rapat untuk membahas secara matang langkah –

langkah yang akan dilakukan untuk menjalankan sebuah program sekaligus dilakukan pembagian tugas – tugas kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan program tersebut,dan rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa,dan dilakukan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan dengan tujuan untuk memberikan pembagian tugas yang jelas kepada para pelaksana program,agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dan kesalahan komunikasi dilapangan,sehingga masing – masing pelaksana tidak lagi kebingungan untuk menghubungi siapa ketika membutuhkan sesuatu dan proses pelaksanaan dilapangan bisa berjalan lancar dan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan bersama sebelumnya.

2) Proses pelaksanaan program dilapangan.

Proses ini meliputi semua kegiatan inti dari program yang sedang dilaksanakan baik yang berupa fisik maupun administrasi,selama proses kegiatan ini tercatat hampir semua kegiatan administrasi lebih banyak dilakukan di rumah Kepala Desa,sementara dalam hal menyampaikan instruksi,arahan/perintah kepada para pelaksana program,Kepala Desa lebih sering mewakilkannya kepada staf pemerintahan Desa bawahannya dan untuk pengawasan dilapangan,Kepala Desa tercatat hanya melakukan tinjauan pada awal dan akhir pelaksanaan program dilapangan saja.

3) Laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan evaluasi.

Kegiatan ini merupakan bagian terakhir dari seluruh proses kegiatan pelaksanaan program tersebut,selain dengan menyusun berkas – berkas laporan selama proses pelaksanaan program,Kepala Desa juga menyampaikan laporan tersebut dalam sebuah rapat penyampaian laporan pertanggungjawaban dan penutupan program dengan anggota BPD dan unsur perwakilan masyarakat,serta seluruh pelaksana program yang telah ikut terlibat dalam menyelesaikan program tersebut,dan dalam rapat ini juga sekaligus dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari program yang telah dilaksanakan tersebut.

Berdasarkan atas seluruh data yang berhasil peneliti kumpulkan,dan juga ditinjau dari gambaran proses pelaksanaan program diatas,kemudian peneliti melakukan analisis yang mendalam.

c) **Peranan yang Kepala Desa jalankan dalam setiap proses implementasi program di Desa.**

1) Peran Kepemimpinan

Dari data – data yang tersaji di atas tersebut, dapat dipastikan bahwa Kepala Desa selalu berperan sebagai pemimpin dan melakukan peran kepemimpinan ini dengan cukup baik.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa kali diadakannya rapat dengan pihak – pihak pelaksana dan pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan program tersebut yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa, sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan juga diperkuat dengan pernyataan – pernyataan dari para narasumber yang tersebut diatas.

2) Peran kordinator

Selain berperan sebagai pimpinan, Kepala Desa juga memiliki peran sebagai seorang koordinator yang cukup baik, selama proses implementasi/pelaksanaan program tersebut. Hal ini juga terlihat dari rapat koordinasi pembagian tugas yang dilakukan sebelum pelaksanaan program dilapangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa, sehingga ketika program tersebut sampai pada proses dilapangan semuanya dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya pun sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan tentu saja kesimpulan ini adalah berdasarkan pada data – data, dan informasi yang peneliti peroleh dari para informan.

3) Peran Komunikator

Dari analisis yang peneliti lakukan selama proses penelitian, peneliti dapat menemukan bahwa Kepala Desa juga mempunyai peranan sebagai komunikator dalam pelaksanaan program tersebut, tetapi peran sebagai komunikator tersebut belum dilakukan dengan baik oleh Kepala Desa.

Hal ini dapat terlihat dari rapat – rapat yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut, disana Kepala Desa dapat mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut dan juga langkah – langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya, dan juga menjadi komunikator bagi tiap – tiap pihak pemangku kepentingan kepada pihak lainnya sehingga terjadi komunikasi yang baik dari masing – masing pihak dan dapat mencegah terjadinya kesalahan komunikasi dan salah paham yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dari pihak – pihak tersebut.

Akan tetapi peranan tersebut menjadi sedikit buruk ketika proses implementasi program sudah mencapai tahap pelaksanaan dilapangan, Kepala Desa lebih sering mengkomunikasikan arahnya melalui staf bawahannya saja dari pada menyampaikannya secara langsung kepada pihak – pihak yang ditujunya, hal ini tentu saja cukup buruk untuk dilakukan karena dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak yang dituju apabila informasi yang disampaikan tersebut tidak utuh lagi, atau dalam penyampaian informasi tersebut pihak yang diminta untuk menyampaikan informasi tersebut tidak tahu cara menyampaikannya, atau bahkan tidak mengerti inti dari

informasi yang hendak disampaikan itu, sehingga pihak yang menjadi tujuan informasi tidak dapat menangkap dengan baik isi dari informasi tersebut dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4) Peran Monitoring/Pengawas

Selama proses pelaksanaan program dilapangan hingga selesai, Kepala Desa tercatat hanya beberapa kali saja turun kelapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan program tersebut, hal ini memberikan gambaran bahwa selama proses pelaksanaan program tersebut Kepala Desa juga berperan sebagai seorang pengawas, tetapi peranan tersebut juga belum dijalankan secara maksimal oleh Kepala Desa, ini dapat terlihat dari jumlah kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak terlalu sering untuk datang meninjau pelaksanaan program tersebut.

5) Peran Penanggungjawab

Peranan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah sebagai seorang penanggungjawab dalam implementasi program yang ada di Desa Labuhan Ratu. hal ini dapat terlihat dari laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa pada akhir pelaksanaan program tersebut, yang menggambarkan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan program – program yang dijalankan di Desa yang berada di bawah kepemimpinannya ini.

5. KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam setiap pelaksanaan program yang ada di Desa, Kepala Desa hampir selalu mempunyai peranan yang sama, yaitu sebagai pemimpin, koordinator, komunikator, pengawas, dan penanggungjawab dalam setiap pelaksanaan program – program tersebut. Secara umum, peranan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari proses pelaksanaan program yang berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan hasilnya pun cukup memuaskan bagi masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi 2). Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- B.N. Marbun, 2008. Proses Pembangunan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. PT. Alumni. Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2003. Metode Penelitian Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nudgroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Nurcholis, Hanif . 2011. pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga. Jakarta.
- Nurkholis, S., & Firdaus, M. (2019). "Studi Analisis Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Binaan di Kabupaten Bogor". Jurnal Ilmu Administrasi, 6(1)
- Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung.
- Pratama, D., & Utama, S. (2022). "Analisis Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Berkelanjutan". Jurnal Manajemen Pemerintahan, 7(1)
- Rahayu, S., & Prasetyo, B. (2020). "Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Sleman". Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 8(2)
- Rahmawati, S., & Wijaya, B. (2023). "Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Produktif: Studi Kasus di Jawa Barat". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2)
- Riyadi, F., & Cahyono, E. (2023). "Pengaruh Komunikasi Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa". Jurnal Pemerintahan Daerah, 10(1)
- Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). "Analisis Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Pembangunan Desa di Jawa Tengah". Jurnal Administrasi Publik, 5(1)
- Santoso, D., & Widayanti, R. (2022). "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa". Jurnal Administrasi Publik, 6(1),
- Setiawan, A., & Fitriyani, D. (2020). "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Mandiri". Jurnal Administrasi Publik, 4(2)
- Setiawan, R., & Rahayu, S. (2023). "Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Produktif". Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 11(2),
- Sudjana, Nana, dkk. (2018). "Analisis Peran Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Mandiri". Jurnal Administrasi Publik, 3(2)
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. ALFABETA. Bandung.
- Supriyadi, A., & Wahyudi, R. (2021). "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Mandiri: Peran Kepala Desa dalam Mendorong Pembangunan Desa". Jurnal Ilmu Administrasi, 8(1)
- Suryanto, C., & Hermawan, R. (2023). "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa". Jurnal Pembangunan Masyarakat, 9(2)
- Susanto, B., & Hidayat, A. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa". Jurnal Administrasi Negara, 8(2)
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Public, Erlangga. Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2002. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa, Duta Aksara, Jakarta.
- Wibowo, A., & Setiawan, D. (2024). "Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Implementasi Program Desa Berbasis Teknologi". Jurnal Inovasi Pemerintahan, 5(2)

- Wibowo, B., & Prasetyo, A. (2024). "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Sejahtera". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1)
- Yusuf, A., & Indriani, D. (2022). "Studi Analisis Pelaksanaan Program Desa Mandiri: Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 10(1)